
PENGUMUMAN

NOMOR: PE.008-BHOSDM/PL/UKPBJ/BJ.02.02/2-3/IV/2023

TENTANG PENGADAAN JASA LAINNYA ANALIS HUKUM

BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP Tahun Anggaran 2023, kami membutuhkan 1 (satu) Orang Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
2. Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum;
3. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/anggaran Tim Hukum pada Biro HOSDM;
4. Membantu membuat laporan-laporan kegiatan Tim Hukum pada Biro HOSDM;
5. Membantu melakukan dokumentasi hukum;
6. Membantu menyiapkan bahan penilaian website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum LKPP; dan
7. Membantu melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan Unit Organisasi.

B. Syarat Pelamar (Persyaratan Kualifikasi)

1. Usia minimal 23 tahun dan maksimal 28 Tahun;
2. IPK minimal 3,00;
3. Pendidikan minimal S1 Hukum;
4. Memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibidang hukum;
5. Diutamakan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan persidangan;
6. Dapat mengoperasikan Ms. Word, Ms. Excel, dan Power Point; dan
7. Dapat bekerja secara mandiri dan tim.

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan pada <https://forms.gle/ZLZPBnc6GhtnND6T6> paling lambat tanggal 18 April 2023 pukul 17.00 WIB.
2. Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

D. Informasi Lainnya

1. Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran 2023 untuk jangka waktu pelaksanaan 8 (delapan) bulan dengan total pagu anggaran untuk masing-masing paket pengadaan jasa lainnya sebesar Rp40.000.000,-/8 bulan atau sebesar Rp5.000.000,-/bulan.
2. Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

ttd

Pejabat Pengadaan
Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah